

**ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR DAERAH DI PROVINSI ACEH
DENGAN PENDEKATAN INDEKS KETIMPANGAN WILLIAMSON PERIODE
TAHUN 2008-2011**

**INCOME DISPARITY ANALYSIS AMONG DISTRICTS IN ACEH PROVINCE
USING INDEX INEQUALITY WILLIAMSON PERIOD 2008-2011**

Oleh: Hakim Muttaqim, B.Soc.Sc.,M.Ec.Dev

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas pendapatan antar daerah di provinsi Aceh menggunakan pendekatan indeks ketimpangan williamson pada periode tahun 2008-2011 yang datanya diperoleh dari data sekunder yaitu data realisasi pendapatan daerah setiap kabupaten yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil Penelelitian diperoleh tingkat disparitas pendapatan terendah secara rata-rata maka Kabupaten Simeulu dan Aceh Singkil dengan indeks wiliamson sebesar 0,2248 dan 0,3564. Tingkat disparitas pendapatan tertinggi dalam wilayah Provinsi Aceh secara rata-rata adalah Aceh Besar dan Aceh Utara dengan indeks Williamson sebesar 0,5869 dan 0,5723.

Kata kunci : Disparitas Pendapatan, Indeks Ketimpangan Williamson

ABSTRAK

This research aims to analyze the income disparity between regions in the province williamson approach inequality index in the period 2008-2011 for which data obtained from secondary data is data for each district local revenue derived from regional planning agency (BAPPEDA) and the Central Bureau of Statistics (BPS). The results obtained Penelelitian lowest level of income disparity in the average Simeulu and Singkil district with an index of 0.2248 and 0.3564 Williamson. The highest income disparity in the region of Aceh province on average are Aceh Besar and Aceh Utara Williamson index of 0.5869 and 0.5723.

Keywords: Income Disparity, Inequality Index Williamson

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi pada umumnya akan mengalami suatu dilema antara kepentingan perkembangan ekonomi dan pemerataan. Perkembangan ekonomi akan menghasilkan *output* nasional yang akan dinikmati oleh warga negara. Pembagian *output* nasional yang dihasilkan laju pertumbuhan ekonomi yang merata dapat dicapai apabila pembangunan output nasional atau hasil pembangunan ini tidak merata, hanya dinikmati oleh sebagian warga negara maka terjadi kesenjangan dalam pembagian pendapatan antar warga negara, kesenjangan ini pada gilirannya akan sangat rentan menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya bisa menimbulkan gejolak atau konflik nasional.

Pembangunan Ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola setiap sumber daya yang ada. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan peluang kerja untuk masyarakat daerah. Apabila pemerataan pembangunan daerah dapat diwujudkan maka akan mempertinggi pendapatan masyarakat yang penghasilannya rendah dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan sehingga dapat merangsang perekonomian suatu daerah.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Ada Terdapat Disparitas Pendapatan Antar daerah Di Provinsi Aceh dengan Pendekatan Indeks Ketimpangan Williamson Periode Tahun 2008-2011?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Disparitas Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Aceh dengan Pendekatan Indeks Ketimpangan Williamson Periode Tahun 2008-2011.

Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai masukan bagi pemerintah Provinsi Aceh dapat melaksanakan pembangunan secara merata serta melakukan pemerataan distribusi pendapatan untuk tiap daerah agar terciptanya kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakat Provinsi Aceh.
2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat sebagai sumber pengetahuan tentang kinerja dan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Provinsi Aceh dalam melaksanakan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

3. Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

LANDASAN TEORITIS

Disparitas Pendapatan

Disparitas pendapatan merupakan hal yang wajar dalam konsep pembangunan nasional. Pada tahap awal pembangunan ekonomi nasional, perbedaan laju pertumbuhan regional yang cukup besar antar provinsi di Indonesia telah mengakibatkan disparitas dalam distribusi pendapatan antar Provinsi. Peningkatan pendapatan perkapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah.

Berkaitan dengan pembangunan regional, Williamson (2005:73) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang selama dalam tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih maju, dilihat dari pertumbuhan ekonomi tampak bahwa keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.

Ketimpangan antar daerah disebabkan oleh mobilisasi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah. Sumber-sumber daya tersebut antara lain akumulasi modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi suatu daerah. Melihat fakta ini dapat dikatakan bahwa disparitas regional merupakan konsekuensi dari pembangunan itu sendiri (Safrizal,2008: 104).

Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Kegiatan perekonomian suatu daerah dapat kita lihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator yang penting dalam menggambarkan kemajuan/kegiatan perekonomian suatu daerah. Dalam lingkup suatu negara istilah Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diartikan sebagai nilai uang berdasarkan harga pasar dari semua barang-barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun, berarti Produk Domestik Regional Bruto mempunyai pengertian yang sama tapi hanya dalam lingkup suatu daerah (Wijaya, 2009:13)

Distribusi Pendapatan

Menurut Soelistyaningsih, (2007: 73) Distribusi pendapatan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan kemiskinan karena cakupannya tidak hanya menganalisa populasi yang berada dibawah garis kemiskinan. Kebanyakan dari ukuran dan indikator yang mengukur tingkat distribusi pendapatan tidak tergantung pada rata-rata distribusi, dan karenanya membuat ukuran distribusi pendapatandipertimbangkan lemah dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan.

Sedangkan menurut Dumairy (2006:93) Distribusi pendapatan adalah tingkat penyebaran pendapatan disuatu wilayah atau daerah. Permasalahan ekonomi yang umum adalah kemiskinan, pengangguran dan penyediaan kesempatan kerja, serta inflasi dan lain-lainnya. Di indonesia, kemiskinan merupakan salah satu masalah yang paling sulit dibenahi, bahkan dari tahun ke tahun angka nominal kesmiskinan di Indonesia cenderung meningkat. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan, salah satunya adalah tidak meratanya distribusi pendapatan.

Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Wilayah

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah (Kuncoro, 2004:26).

Menurut Tambunan (2007:68) mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan wilayah antara lain :

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Semakin tinggi konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah.
2. Alokasi Investasi yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain bahwa kurangnya investasi disuatu wilayah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat perkapita di wilayah tersebut rendah, karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.
3. Tingkat Mobilitas dan faktor-faktor produksi yang rendah antar daerah. Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal bisa menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi regional.
4. Perbedaan Sumber daya Alam antar daerah. Dasar pemikiran klasik mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumberdaya alamnya akan lebih cepat maju dibandingkan dengan daerah yang miskin sumber daya alam.
5. Perbedaan kondisi demografis antar wilayah. Ketimpangan ekonomi regional juga disebabkan oleh perbedaan kondisi demografis, terutama dalam hal jumlah dan

pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lewat sisi permintaan dan penawaran.

6. Kurang lancarnya perdagangan. Kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga merupakan unsur-unsur yang turut menciptakan terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Ketidاكلancaran tersebut lebih disebabkan oleh keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi.

Distribusi Ukuran Ketimpangan dan koefisien Gini

Menurut Williamson dalam Adelma (2007:143) distribusi ukuran adalah besar atau kecilnya pendapatan yang diterima masing-masing orang. Distribusi pendapatan perseorangan (*personal distribution of income*) atau distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*) merupakan indikator yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Yang diperhatikan di sini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, entah itu bunga simpanan atau tabungan, laba usaha, utang, hadiah ataupun warisan.

Menurut Williamson dalam Adelma (2007:148) agregat koefisien gini adalah ukuran statistik pertebaran paling menonjol digunakan sebagai ukuran ketidakerataan distribusi pendapatan atau ketidakmerataan distribusi kekayaan. Hal ini ditetapkan sebagai rasio dengan nilai antara 0 dan 1, koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi. 0 berkaitan dengan kesetaraan sempurna dan 1 berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (di mana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

METODELOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh dari tahun 2008 hingga tahun 2011. Untuk memberikan suatu gambaran mengenai analisis disparitas pendapatan antar daerah di Provinsi Aceh maka digunakan indeks ketimpangan regional Williamson, (Maqim,2005:8), formulasinya adalah sebagai berikut:

$$Iw = \sqrt{\frac{\sum(Y_1 - \bar{Y})^2 \frac{f_1}{n}}{\bar{Y}}}$$

Dimana :

Y_i : PDRB Perkapita Provinsi Aceh

\bar{Y} : PDRB Perkapita rata-rata seluruh Kabupaten/Kota
 f_i : Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
 n : Jumlah Penduduk total di Provinsi Aceh
 I_w : Nilai Indeks Ketimpangan Wiliamson

Kriteria disparitas dapat dijelaskan dengan indeks antara 0 dan 1 dimana angka 0 menunjukkan kesetaraan pendapatan antara daerah secara sempurna, sedangkan angka 1 menunjukkan ketidaksetaraan pendapatan yang tidak sempurna antara daerah, dimana suatu daerah memiliki pendapatan yang tinggi sedangkan daerah lainnya memiliki pendapatan yang rendah.

Hasil Penelitian

Pertumbuhan ekonomi dan tingkat disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh, dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapitanya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi daerah. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita merupakan hasil bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk wilayah yang bersangkutan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Adapun tingkat disparitas pendapatan antar daerah yang terjadi di Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Indeks Williamson Disparitas Pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh Tahun 2008-2011

Kabupaten / Kota	Indeks Williamson Disparitas Pendapatan				
	2008	2009	2010	2011	Rata-Rata
Simeulu	0,1483	0,5333	0,1410	0,1556	0,2248
Aceh Singkil	0,1610	0,6093	0,2342	0,6429	0,3564
Aceh Besar	0,5042	0,6124	0,4795	0,3950	0,5869
Bireuen	0,4021	0,4242	0,4884	0,4893	0,5447
Aceh Utara	0,4389	0,3641	0,5984	0,9703	0,5723
Gayo Lues	0,4371	0,5248	0,7894	0,0154	0,4428
Nagan Raya	0,4118	0,3678	0,7534	0,3144	0,4448
Aceh Jaya	0,4779	0,2467	0,6142	0,4156	0,4681
Pidie Jaya	0,5345	0,1679	0,6345	0,2671	0,4977
Subulussalam	0,1247	0,4703	0,4767	0,4678	0,5007
Provinsi Aceh	0,3641	0,4327	0,5210	0,4519	0,4639

Sumber : Data diolah.

PEMBAHASAN

Tahun 2008 Kabupaten Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah dalam wilayah Provinsi Aceh dengan tingkat disparitas pendapatan yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten lainnya, dimana masing-masing indeks wiliamsonnya adalah 0,1247 dan 0,1483 bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat disparitas pendapatan yang terjadi di Provinsi Aceh yang mencapai 0,3641. Hal tersebut dikarenakan oleh tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi kedua daerah tersebut yang menyebabkan tingginya perolehan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, sehingga distribusi pendapatan dapat tersalurkan secara merata. Sementara daerah yang memiliki tingkat disparitas tertinggi adalah Kabupaten Pidie jaya dan Aceh Besar dimana indeks wiliamson kedua daerah tersebut masing-masing adalah 0,5345 dan 0,5042. Hal tersebut dikarenakan oleh pertumbuhan ekonomi kedua daerah tersebut tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk yang menyebabkan rendahnya perolehan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, sehingga dalam penyaluran pendapatan tidak dapat terdistribusikan secara merata.

Pada tahun 2009 Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah dalam wilayah Provinsi Aceh dengan tingkat disparitas pendapatan yang lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya, dimana masing-masing indeks wiliamsonnya adalah 0,1679 dan 0,3641 bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat disparitas pendapatan yang terjadi di Provinsi Aceh yang mencapai 0,4327. Rendahnya disparitas pendapatan dikarenakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi dan sektor ekonomi daerah, sehingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kedua daerah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sementara daerah yang memiliki tingkat disparitas tertinggi adalah Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Singkil dimana indeks wiliamson kedua daerah tersebut masing-masing adalah 0,6124 dan 0,609. Tingginya disparitas pendapatan di Kabupaten Aceh Besar dikarenakan menurunnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah, sehingga menyebabkan turunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan Tingginya disparitas pendapatan di Kabupaten Aceh singkil dikarenakan oleh konsekuensi dari proses pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Pada tahun 2010 Kabupaten Simeulu dan Aceh Singkil merupakan daerah dalam wilayah Provinsi Aceh dengan tingkat disparitas pendapatan yang lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya, dimana masing-masing indeks wiliamsonnya adalah 0,1410 dan 0,2342 bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat disparitas pendapatan yang terjadi di Provinsi Aceh yang mencapai 0,5210. Pada tahun 2010 kedua daerah tersebut mendapatkan

tambahan modal yang berupa investasi asing dan investasi swasta dalam mengembangkan sektor ekonomi potensial yang menyebabkan kondisi ekonomi kedua daerah tersebut mengalami pertumbuhan. Sementara daerah yang memiliki tingkat disparitas tertinggi adalah Kabupaten Gayo Lues dan Nagan Raya dimana indeks wiliamson kedua daerah tersebut masing-masing adalah 0,7894 dan 0,7534. Tingginya disparitas pendapatan dikedua daerah tersebut dikarenakan menurun kontribusi sektoral secara agregat bagi perekonomian daerah.

Pada tahun 2011 Kabupaten Simeulu dan Pidie Jaya merupakan daerah dalam wilayah Provinsi Aceh dengan tingkat disparitas pendapatan yang lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya, dimana masing-masing indeks wiliamsonnya adalah 0,1556 dan 0,2671 bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat disparitas pendapatan yang terjadi di Provinsi Aceh yang mencapai 0,4519. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya investasi dan peningkatan pengeluaran pemerintah, terutama dalam mengembangkan sektor primer sebagai sektor andalan bagi kedua daerah tersebut. Sementara daerah yang memiliki tingkat disparitas tertinggi adalah Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Singkil dimana indeks wiliamson kedua daerah tersebut masing-masing adalah 0,5869 dan 0,6429. Hal tersebut dikarenakan oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita menjadi menurun.

Jika dilihat dari perolehan tingkat disparitas pendapatan terendah secara rata-rata maka Kabupaten Simeulu dan Aceh Singkil dengan indeks wiliamson sebesar 0,2248 dan 0,3564, hal tersebut dikarenakan kedua daerah tersebut memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil dan perkembangan sektoral serta rendahnya laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan daerah dalam wilayah Provinsi Aceh yang memiliki tingkat disparitas pendapatan tertinggi secara rata-rata adalah Aceh Besar dan Aceh Utara dengan indeks Williamson sebesar 0,5869 dan 0,5723. Hal tersebut dikarenakan daerah tersebut memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang rendah serta kurang mendapat sentuhan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.

Adanya disparitas pendapatan antar daerah diduga karena potensi sumber daya yang dimiliki antara daerah satu dengan daerah yang lainnya tidak merata dan tidak seragam, oleh karena itu pertumbuhannya berbeda. Untuk dapat tumbuh secara cepat, suatu daerah perlu memilih satu atau lebih pusat-pusat pertumbuhan regional yang memiliki potensi paling kuat. Disparitas pendapatan antar daerah yang disebabkan oleh terpusatnya investasi suatu daerah. Pada kenyataannya besaran investasi di tiap wilayah dan tiap sektor berbeda-beda. Keputusan investasi di tiap wilayah dan tiap sektor sangat dipengaruhi oleh duapelaku utamanya, yaitu pengusaha dan pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya.

KESIMPULAN

1. Pada tahun 2008 Kabupaten Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah dalam wilayah Provinsi Aceh dengan tingkat disparitas pendapatan yang lebih rendah dikarenakan oleh tingginya perolehan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, sedangkan Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Besar memiliki tingkat disparitas tertinggi yang dikarenakan oleh tidak seimbang laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk.
2. Pada tahun 2009 Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah dalam wilayah Provinsi Aceh dengan tingkat disparitas pendapatan yang lebih rendah dikarenakan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi dan sektor ekonomi daerah, sementara daerah yang memiliki tingkat disparitas tertinggi adalah Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Singkil akibat dari menurunnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah.
3. Pada tahun 2010 Kabupaten Simeulu dan Aceh Singkil merupakan daerah dalam wilayah Provinsi Aceh dengan tingkat disparitas pendapatan yang lebih rendah dikarenakan adanya sejumlah investasi sehingga kondisi ekonomi mengalami pertumbuhan. Sementara daerah yang memiliki tingkat disparitas tertinggi adalah Kabupaten Gayo Lues dan Nagan Raya akibat dari menurun kontribusi sektoral secara agregat bagi perekonomian daerah.
4. Pada tahun 2011 Kabupaten Simeulu dan Aceh Singkil merupakan daerah dalam wilayah Provinsi Aceh dengan tingkat disparitas pendapatan yang lebih rendah dikarenakan oleh adanya investasi dan peningkatan pengeluaran pemerintah, terutama dalam mengembangkan sektor primer, sementara daerah yang memiliki tingkat disparitas tertinggi adalah Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Singkil dikarenakan oleh tingginya laju

pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita menjadi menurun.

SARAN

1. Diharapkan bagi pemerintah Provinsi Aceh untuk dapat melaksanakan pembangunan secara merata serta melakukan pemerataan distribusi pendapatan untuk tiap daerah agar terciptanya kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakat Provinsi Aceh.
2. Diharapkan bagi pemerintah Kabupaten dan Kota untuk dapat meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita agar disparitas pendapatan yang terjadi di daerah dapat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelma. Irma. (2007). *Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang*. Jakarta. Balai Pustaka
- Dumairy (2006). *Makroekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru, Jakarta*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Ikhsan. Maqim. (2005). *Analisis Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Jawa Barat. Jurnal Ekonomi. Volume VIII*. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Kuncoro. Mudrajad, (2004). *Teori Pembangunan Ekonomi*. Jakarta; Balai Pustaka
- Safrizal, (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang. Baduouse Media
- Soelistyaningsih (2007). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan (Alih Bahasa oleh Haris Munandar dan Puji A.L.)*. Jakarta: Erlangga.
- Tambunan. Tulus T.H. (2000). *Transformasi Ekonomi di Indonesia : Teori dan Penemuan Empiris*, Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Williamson (2005). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Edisi Pertama*. Yogyakarta. ANDI
- Wijaya, (2009). *Pertumbuhan Ekonomi*, Jakarta. Rineka Cipta.